

Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi dan Kualitas Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Yanto¹

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: yanto@unisnu.ac.id

Shalha Qotrun Nada²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: shalhaqotrunnada@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to analyze the influence of the application of regional financial accounting standards, the use of information technology and the quality of regional government apparatus on the quality of regional financial reports in the Regional Apparatus Organization (OPD) of Jepara Regency. The population is 46 OPD financial managers. The research results show that the application of regional financial accounting standards has a significant positive effect on the quality of regional financial reports, as shown by the value of $t_{count} (2.006) > t_{table} (1.65630)$ and $sig. 0.016 < 0.05$; The use of information technology has a significant positive effect on the quality of regional financial reports, as shown by the value of $t_{count} (2.567) > t_{table} (1.65630)$ and $sig. 0.009 < 0.05$; and the quality of regional government apparatus has a significant positive effect on the quality of regional financial reports as shown by the value of $t_{count} (2.434) > t_{table} (1.65630)$ and $sig. 0.015 < 0.05$.

Keywords: Standards, Technology, Apparatus, Financial Reports.

PENDAHULUAN

Kemunculan fenomena dengan menguatnya tuntutan pertanggungjawaban berkaitan dengan organisasi-organisasi sektor publik maka pemerintah terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan keuangan daerah supaya mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dilakukanlah melalui upaya penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditentukan selaras pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di daam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan pada sektor pemerintah dapat ditingkatkan.

Laporan keuangan sektor pemerintah adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan keuangannya. Oleh karena itu, laporan keuangan sektor pemerintah harus berkualitas tinggi. (Sinulingga, Simanjuntak, & Ginting, 2022). Laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kriteria kualitatif yang ditetapkan oleh PP No.71 Tahun 2010 dianggap berkualitas tinggi. Kualitas laporan keuangan menunjukkan seberapa jauh laporan keuangan yang disiapkan menunjukkan informasi yang aktual dan andal (Hadiyanti & Nahar, 2018).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara memenuhi persyaratan akuntansi pemerintah, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kinerja sistem pengendalian intern yang baik. Sebagai berikut adalah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara:

Tabel 1. Predikat Opini Kabupaten Jepara

Tahun	Opini
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

Sumber: jateng.bpk.go.id (2023)

Tiga faktor dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah: tingkat pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi keuangan daerah, dan kualitas staf. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia, standar akuntansi pemerintahan harus menjadi dasar untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan ini, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan semua pertimbangan yang berkaitan dengan cara penyajian laporan keuangan, pedoman untuk struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal untuk isi laporan keuangan (Zeyn, 2011). Hasil penelitian (Pujanira & Taman, 2017) dan (Jauhari, Hazisma, & Dewata, 2021) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian (Lathif, Diana, & Mawardi, 2020) Penerapan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah komponen tambahan yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengatur bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah harus menggunakan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatisasi juga memerlukan aparatur untuk beralih dari proses manual ke proses terkomputerisasi (Hamzah, 2009). Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, terutama dalam menyusun laporan keuangan, akan mempercepat dan menyajikan data keuangan pemerintah daerah dengan lebih akurat. Hasil penelitian (Binawati & Nindyaningsih, 2022) teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas akuntansi keuangan daerah, hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Gasperz, 2019) bahwa kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi.

Anggriawan dan Yudianto (2014) percaya bahwa perusahaan pemerintah memiliki manajemen keuangan yang baik jika mereka memiliki sumber daya manusia atau aparatur daerah yang berkualitas, dengan pengalaman keuangan dan pendidikan akuntansi. Sumber daya manusia adalah bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Selain ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah menyediakan laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian (Sinulingga, Simanjuntak, & Ginting, 2022) kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian (Pravasanti & Ningsih, 2019) aparatur pemerintah yang berkualitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan fenomena dan researchgap tersebut, maka peneliti tertarik membahas “**Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi dan Kualitas Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama periode tertentu mengenai laporan posisi keuangan masing-masing. karena pemerintah harus menyajikan laporan keuangan secara wajar dan diungkap secara lengkap untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan. Kualitas menurut Mulyana, (2010) didefinisikan sebagai kesesuaian dengan standar yang ditentukan melalui kadar kesesuaian dan diukur melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dianggap sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan jika informasinya disusun dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selain itu, laporan keuangan yang baik juga dapat dipahami oleh orang yang menggunakannya. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Jadi kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan

akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

- a. Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.
- b. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikal.
- c. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi, standar akuntansi keuangan adalah komponen penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat. Apabila standar akuntansi pemerintah dipahami, mereka dapat menyajikan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar (Wati dkk, 2014). Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan, yang memiliki kekuatan hokum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan..

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Ini dilakukan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antarperiode, dan antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar orang. Untuk mencapai tujuan ini, standar akuntansi pemerintahan menetapkan semua pertimbangan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, pedoman untuk struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Turban, et.al. (2005) Aspek teknologi sistem informasi termasuk hardware, software, database, dan jaringan (network). Sedangkan menurut Maryono dan Istiana (2006) Teknologi informasi adalah sistem atau metode yang digunakan oleh manusia untuk mengirimkan informasi atau pesan. Menurut Irwansyah dan Moniaga (2014) Pengertian teknologi informasi adalah semua jenis teknologi yang tersedia yang memungkinkan manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi. Di sini, informasi dikirim dan disimpan dalam komputer melalui teknologi komunikasi. Jadi, teknologi informasi adalah penggunaan perangkat komputer untuk memproses, menyajikan, dan mengolah data dan informasi laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan. Selain itu, jaringan internet dapat digunakan untuk pelayanan publik dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu tujuan utama dalam bidang teknologi informasi adalah mencapai tujuan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Teknologi informasi seperti komputer adalah sumber informasi yang selalu tersedia untuk individu dan organisasi pemerintahan. Karena mudah digunakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama, teknologi informasi dapat dianggap efektif dan efisien. Dalam sistem informasi akuntansi, teknologi informasi membantu pengambilan keputusan.

4. Kualitas Aparatur Daerah

Pengertian kualitas menurut Mulyana (2010) adalah Kesesuaian dengan standar diukur dengan menghitung tingkat ketidaksesuaian dan pemeriksaan. Pengertian aparatur pemerintah menurut Salam (2004) adalah Pekerja yang digaji pemerintah melakukan tugas teknis pemerintah dan melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian aparatur pemerintah daerah menurut Koswara (2001) adalah semua perangkat daerah yang menangani urusan rumah tangga dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas dan fungsi utamanya secara menyeluruh adalah yang dimaksud dengan kualitas aparatur daerah. Kompetensi ASN di bidang akuntansi (keuangan) memungkinkan ASN yang profesional untuk memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, sehingga laporan tersebut dapat memenuhi kualifikasi informasi yang bermanfaat.

Indikator untuk menilai kompetensi aparatur menurut Sutrisno dan Sinambaela (2016), yaitu:

- Pengetahuan: kesadaran dalam domain kognitif. Seorang karyawan, misalnya, mengetahui cara mengidentifikasi belajar dan melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
- Pemahaman ke dalam kapasitas kognitif dan afektif seseorang. Seorang karyawan, misalnya, harus memahami karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien untuk melakukan pembelajaran.
- Kemampuan: Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat menyelesaikan tugas atau tugas yang diberikan kepadanya.
- Nilai: suatu norma perilaku yang diyakini dan ditanamkan dalam pikiran seseorang. Sikap (Attitude). Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- Kecenderungan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti melakukan tugas.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yang berasal dari filsafat positivisme dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2017). Penelitian jenis ini adalah proses penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka hasil analisis data tentang bagaimana Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi, dan Kualitas Aparatur Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Operasi Pemerintah Kabupaten Jepara.

2. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan memahami dalam penggunaan makna yang yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional variabel berbentuk tabel seperti berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kualitas yang berarti informasinya dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna, dan dapat diandalkan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya.	- Relevan - Andal - Dapat dibandingkan - Dapat dipahami (Kuntari, 2017)	Skala Likert 1-5

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat analisis transaksi sampai dengan pelaporan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.	- Pencatatan dengan Bukti. - pengelolaan keuangan - Informasi yang disajikan (Kuntari, 2017)	Skala Likert 1-5
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat komputer untuk memproses, menyajikan, dan mengolah data dan informasi laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan. Selain itu, jaringan internet dapat digunakan untuk pelayanan publik dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.	- pengolahan data - pengolahan informasi - pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik (Zuliarti, 2012)	Skala Likert 1-5
Kualitas Aparatur Daerah	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas menentukan kualitas aparatur daerah. ASN yang profesional akan dapat memenuhi standar dan target dengan kemampuan yang dimilikinya. ASN, yang berpengalaman dalam akuntansi (keuangan), memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, sehingga laporan tersebut memenuhi kualifikasi informasi yang bermanfaat	- Pendidikan - Tanggung jawab - pelatihan - pengalaman (Kuntari, 2017)	Skala Likert 1-5

3. Populasi, dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan dipelajari oleh peneliti sebelum mengambil kesimpulan (2011). Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan pengelola keuangan dari 46 OPD di Kabupaten Jepara. Respondennya terdiri dari kepala dinas atau badan, Sekretariat Sub Bagian Keuangan, Sekretariat Sub Bagian Umum, dan Pegawai. Dari 46 OPD tersebut, 3 orang akan dipilih untuk menjadi responden sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melibatkan 138 orang.

Jumlah dan karakteristik populasi terdiri dari sampel menurut Sugiyono (2011). Penelitian ini akan mengambil 138 sampel dari populasi, menggunakan metode purposive sampling.

4. Metode Analisis Data

a. Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas menunjukkan seberapa baik alat pengukur dapat mengukur apa yang kita inginkan tanpa mengukur yang lain, sehingga hasil pengukurannya valid (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal tersebut (n) adalah jumlah sampel penelitian. Kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut:

- Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item kuesioner tersebut valid.
- Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item kuesioner tersebut dikatakan tidak valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa reliabel suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator dari suatu konstruk atau variabel. Kuesioner dianggap reliabel jika tanggapan respondennya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* (α), yaitu instrumen dikatakan reliabel jika *Cronbach alpha* $> 0,6$.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), dengan kriteria:

- Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov $< 0,05$ berarti residual dinyatakan tidak terdistribusi normal.
- Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-smirnov $> 0,05$ berarti residual dinyatakan terdistribusi normal.

2) Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan Uji Glejser, dengan kriteria:

- Jika nilai probabilitas signifikansi $>$ tingkat kepercayaan (0,05), maka model regresi tidak ada atau memiliki heteroskedastisitas
- Jika nilai probabilitas signifikansi $<$ tingkat kepercayaan (0,05), maka model regresi ada atau memiliki heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3) Uji Multikolinieritas. Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan apakah model regresi menunjukkan bahwa ada korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas digunakan nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF), dengan kriteria:

- Model regresi bebas multikolinieritas jika *tolerance* $< 0,10$ atau $VIF > 10$.
- Model regresi tidak terbebas multikolinieritas jika *tolerance* $> 0,10$ atau $VIF < 10$.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh yang ada di antara penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas aparatur daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

β_2 = Koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi

β_3 = Koefisien regresi Kualitas Aparatur Daerah

X_1 = Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

X_2 = Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Variabel Kualitas Aparatur Daerah

e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

d. Uji Hipotesis

1) Uji F (Uji Model)

Uji kelayakan model, juga dikenal sebagai uji kelayakan model, dilakukan untuk mengetahui seberapa baik fungsi regresi sampel menaksir nilai aktual secara statistik. Nilai statistik F, yang menunjukkan apakah setiap variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, adalah ukuran dari model kelayakan model. Kriteria pengujian:

- Pvalue < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.
- Pvalue > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

2) Uji t (Uji Parsial)

Dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel, uji t dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kriteria penerimaan dan penolakan Ho sebagai berikut:

- Jika T hitung > T tabel atau signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak
- Jika T hitung < T tabel atau signifikansi >0,05 maka Ho diterima

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada dasarnya, koefisien determinasi adalah ukuran seberapa baik variable bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Koefisien determinasi berkisar dari nol hingga satu. Nilai R² kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan nilai R² besar menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen besar. Nilai R² kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan nilai R² besar menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen besar.

HASIL PENELITIAN

1. Uji Kualitas Instrumen

a. Uji Validitas

Valid tidaknya suatu kuesioner diukur dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} , jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif maka dikatakan valid **Invalid source specified..** Jumlah sampel (n) = 138 dan besarnya $df = 138 - 2 = 136$ dengan probabilitas 0,05 di dapat r_{tabel} 0,176 . Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Terhadap kualitas laporan keuangan	Y.1	0,596	0,176	Valid
	Y.2	0,607	0,176	Valid
	Y.3	0,327	0,176	Valid
	Y.4	0,653	0,176	Valid
	Y.5	0,598	0,176	Valid
	Y.6	0,457	0,176	Valid
	Y.7	0,470	0,176	Valid
	Y.8	0,335	0,176	Valid
	Y.9	0,550	0,176	Valid
Standar akuntansi keuangan daerah	X1.1	0,289	0,176	Valid
	X1.2	0,332	0,176	Valid
	X1.3	0,473	0,176	Valid
	X1.4	0,698	0,176	Valid
	X1.5	0,582	0,176	Valid
	X1.6	0,581	0,176	Valid
	X1.7	0,535	0,176	Valid
	X1.8	0,687	0,176	Valid

	X1.9	0,568	0,176	Valid
	X1.10	0,660	0,176	Valid
Pemanfaatan teknologi informasi	X2.1	0,600	0,176	Valid
	X2.2	0,700	0,176	Valid
	X2.3	0,667	0,176	Valid
	X2.4	0,525	0,176	Valid
	X2.5	0,686	0,176	Valid
	X2.6	0,684	0,176	Valid
Kualitas aparatur pemerintah daerah	X3.1	0,464	0,176	Valid
	X3.2	0,453	0,176	Valid
	X3.3	0,365	0,176	Valid
	X3.4	0,353	0,176	Valid
	X3.5	0,539	0,176	Valid
	X3.6	0,534	0,176	Valid
	X3.7	0,524	0,176	Valid
	X3.8	0,462	0,176	Valid
	X3.9	0,567	0,176	Valid
	X3.10	0,728	0,176	Valid
	X3.11	0,606	0,176	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Hasil uji validitas menunjukkan masing-masing indikator pertanyaan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,176), berarti seluruh item pertanyaan dapat dikatakan valid, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen variabel dikatakan Reliabel jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan konsisten dan stabil, dibuktikan dengan nilai *Chronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji Reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	><	Nilai Standar	Keterangan
Kualitas laporan keuangan	0,723	>	0,60	Reliabel
Standar akuntansi keuangan daerah	0,745	>	0,60	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	0,778	>	0,60	Reliabel
Kualitas aparatur pemerintah daerah	0,711	>	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Chronbach Alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan indikator yang berada di dalam kuesioner dikatakan Reliabel.

2. Uji Asusmi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, dengan kriteria jika *Asymp. Sig. K-S* > α (0,05) maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan:

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		138
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	Std. Deviation	3.36454879
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.041
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji normalitas didapat nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar $0,200 > \alpha (0,05)$, berarti data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser, dengan kriteria jika nilai sig. variabel independen dengan *absolute* residual $> 0,05$ maka tidak terjadinya heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 6. Uji Glejser
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.659	1.931		.341	.733
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 1 Daerah	.048	.041	.115	1.163	.247
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.033	.057	-.057	-.580	.563
Kualitas Aparatur Daerah	.019	.051	.041	.365	.716

a. Dependent Variable: RESABS

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji didapat nilai sig. seluruh variabel independen $> 0,05$, maka dapat dinyatakan tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* pada masing-masing variabel bebasnya, dengan kriteria jika nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 7. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 1 Daerah	.749	1.334
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.758	1.319
Kualitas Aparatur Daerah	.589	1.699

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji multikolinieritas didapat nilai *Tolerance* variabel independen $> 0,10$. dan nilai VIF menunjukkan < 10 , artinya tidak terjadi Multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan koefisien regresi dengan SPSS, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	39.069	2.998		13.032	.000
1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	.065	.064	.098	2.006	.016
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.140	.089	.152	2.567	.009
Kualitas Aparatur Daerah	.114	.079	.158	2.434	.015

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer diolah, 2023

Untuk menyusun persamaan regresi dalam penelitian ini menggunakan *Standardized Coefficients Beta*, karena variabel penelitian bersifat kualitatif, sehingga persamaan regresi berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 0,098X_1 + 0,152X_2 + 0,158X_3$$

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Standardized Coefficients Beta* standar akuntansi keuangan diketahui 0,098, berarti standar akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif. Jadi apabila penerapan standar akuntansi keuangan daerah semakin ditingkatkan, maka akan berakibat meningkat pula kualitas laporan keuangan.
- Standardized Coefficients Beta* pemanfaatan teknologi informasi diketahui 0,152, berarti pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif. Jadi apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin ditingkatkan, maka akan berakibat meningkat pula kualitas laporan keuangan.
- Standardized Coefficients Beta* kualitas aparatur pemerintah daerah diketahui 0,158, berarti kualitas aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh positif. Jadi apabila Variabel kualitas aparatur pemerintah daerah semakin ditingkatkan, maka akan berakibat meningkat pula kualitas laporan keuangan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F atau *goodness of fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik, dengan kriteria *Pvalue* < 0,05 menunjukkan bahwa model (persamaan) ini layak untuk digunakan. Hasil uji F didapat sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	73.779	3	24.593	12.125	.000 ^b
Residual	1550.866	134	11.574		
Total	1624.645	137			

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji F didapat nilai *Pvalue* (0,000) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model ini layak untuk digunakan pada penelitian.

b. Uji t (Parsial)

Dengan $df = n - k = 138 - 3 = 135$, dan tingkat signifikan 0,05 diketahui besarnya t_{tabel} sebesar

1,65630. Hasil *output* SPSS perhitungan t hitung ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 10. Uji-t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	39.069	2.998		13.032	.000
1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	.065	.064	.098	2.006	.016
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.140	.089	.152	2.567	.009
Kualitas Aparatur Daerah	.114	.079	.158	2.434	.015

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer diolah, 2023

1) Uji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 2,006. Jadi nilai $t_{hitung} (2,006) > t_{tabel} (1,65630)$ dan nilai signifikan $0,016 < 0,05$ maka **Hipotesis 1 diterima**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jadi dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan semakin baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Jepara.

2) Uji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 2,567. Jadi nilai $t_{hitung} (2,567) > t_{tabel} (1,65630)$ dan nilai signifikan $0,009 < 0,05$ maka **Hipotesis 2 diterima**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jadi dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang sebaik-baiknya untuk bekerja maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Jepara

3) Uji pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Kualitas Aparatur Daerah sebesar 2,434. Jadi nilai $t_{hitung} (2,434) > t_{tabel} (1,65630)$ dan nilai signifikan $0,015 < 0,05$ maka **Hipotesis 3 diterima**. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jadi dengan adanya kualitas aparatur daerah semakin berkompetensi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Jepara.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. Karena variabel penelitian kualitatif, Koefisien determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel:

Tabel 11. Uji Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.513 ^a	.545	.424	3.402	2.986

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji koefisien determinasi didapat sebesar 0,424. Hal tersebut menjelaskan 42,4% variasi dari Kualitas Laporan Keuangan dijelaskan oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Aparatur Daerah, sedangkan pada sisanya yaitu sebesar 57,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan uji hipotesis diketahui nilai t_{hitung} untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar $2,006 > t_{tabel} (1,65630)$ dan nilai signifikan $0,016 < 0,05$ maka hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian membuktikan hipotesis bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai acuan, sehingga merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Pujanira & Taman, 2017) dan (Jauhari, Hazisma, & Dewata, 2021) yang hasilnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar $2,567 > t_{tabel} (1,65630)$ dan nilai signifikan $0,009$ lebih kecil dari $< 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian membuktikan hipotesis bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berdampak positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Keuangan Pemerintah Daerah Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah; semakin baik pemanfaatannya, semakin baik pula laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Binawati & Nindyaningsih, 2022) yang hasilnya Pemanfaatan Teknologi Informasi meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel Kualitas Aparatur Daerah sebesar $2,434 > t_{tabel} (1,65630)$ dan nilai signifikan $0,015$ lebih kecil dari $< 0,05$ maka hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian membuktikan hipotesis bahwa Kualitas Aparatur Daerah berdampak positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk mencapai tujuan, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan sumber daya manusia. Selain ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk mencapai tujuan. Menjamkan sumber daya manusia (MSDM) diperlukan agar ada orang yang berkualitas tinggi dan berhasil. ASN profesional yang berpengetahuan luas, berpengalaman, dan sportif sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Profesional ASN akan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara menyeluruh. Kemampuan mereka memungkinkan ASN untuk melaksanakan fungsi dan tugas penting secara optimal. Kualitas ASN dalam bidang akuntansi (keuangan) berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini karena ASN yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penggerak utama untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Sinulingga, Simanjuntak, & Ginting, 2022) yang hasilnya Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

KESIMPULAN

1. Standar akuntansi pemerintah daerah berdampak positif pada laporan keuangan OPD Kabupaten Jepara. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah akan ditingkatkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif pada laporan keuangan OPD Kabupaten Jepara. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik dengan penerapan teknologi informasi.

3. Kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Jepara dipengaruhi positif oleh kualitas aparatur daerah; dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klat. *OPTIMAL* , Vol. 19, No.1.
- Dalimunthe, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur terhadap Laporan Keuangan pada kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kab. Simalungun. *Jurnal Mutiara Akuntansi* , Vol. 6, No. 1.
- Gasperz, J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan* , Volume 5.
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI* , Vol. 2, nomor 2, hal. 82-97.
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi* , Vol 8 No. 1.
- Jultri, A., Made, A., & Wirshandono, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada BKAD Kabupaten Malang). *JURNAL Riset MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)* , Volume IX, No. 1.
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing* , Vol. 2 No. 2.
- Lathif, A., Diana, N., & Mawardi, C. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-JRA* , Vol. 09 No. 06.
- Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Syariah* , Volume 2 Nomor 2.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal* , VOLUME VI NOMOR 2.
- Sinulingga, P. S., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen* , Volume 8 Nomor 1.